



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1991 SERI : B NO : 3**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR : 6 TAHUN 1991

**TENTANG
BANGUNAN PEMERINTAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa karena terbatasnya tanah, maka harga tanah semakin tinggi nilai ekonomisnya, sehingga ada kecenderungan membangun bertingkat banyak di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
 - b. Bahwa untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan tata ruang kota, maka perlu diberikan kriteria yang jelas untuk membangun Bangunan Bertingkat disesuaikan dengan letak lokasi bangunan dan unsur-unsur lingkungan kota disekitar bangunan didirikan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengatur bangunan Bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dilingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Hinder Ordonantie Stb. Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450;
 4. Momentum Ordonantie (MO) Stb. Tahun 1931 Nomor 238;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Tata Ruang Kota;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Master Plan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG BANGUNAN BERTINGKAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.
- c. Bangunan Bertingkat adalah bangunan yang meliputi lebih dari satu yang bertumpu pada dasar yang sama atau yang mempunyai ketinggian lebih dari ukuran tinggi bangunan satu lantai.
- d. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter.
- e. Jumlah Lantai Bangunan adalah jumlah lantai yang dipunyai bangunan baik diatas maupun dibawah permukaan tanah
- f. Dalam bangunan diukur dari lantai dasar sampai dengan lantai terdalam
- g. Persil adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam rencana kota yang telah diperhitungkan terhadap Garis Sempadan Jalan (GBJ)
- h. Angka Luas Lantai (ALL) angka perbandingan antara jumlah luas lantai suatu bangunan dengan luas persil.
- i. Angka Lantai Dasar (ALD) adalah angka perbandingan antar bidang terluas yang boleh dibangun diatas maupun didalam tanah dengan luas persil
- j. Angka Ruang Parkir (ARP) adalah angka perbandingan antara jumlah luas ruang parkir dengan jumlah total luas lantai.
- k. Angka Ruang Hijau (ARH) adalah angka perbandingan antara jumlah luas ruang hijau dngan jumlah total luas lantai.

BAB II

PENGATURAN BANGUNAN BERTINGKAT

Pasal 2

Untuk mendirikan bangunan bertingkat di Kotamadya Daerah Surakarta Daerah Tingkat II Surakarta, selain harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Bangunan bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diatur berdasar tinggi dan kedalaman bangunan jumlah lantai, kepadatan, persil, ruang parkir dan ruang hijau, garis-garis sempadan dan lingkungan bangunan.
- (2) Pengaturan bangunan bertingkat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diatur pada kawasan-kawasan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) dan jalan-jalan di Kotamadya yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ayat 2 Pasal ini, pengaturan Bangunan Bertingkat yang tidak tercantum sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III

KRITERIA BANGUNAN BERTINGKAT

Pasal 4

Tinggi atau jarak antara lantai sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter sebesar-besarnya 6 (enam) meter.

Pasal 5

Bangunan bertingkat diatas maupun dibawah permukaan tanah pengaturan ketinggian dan kedalamannya diatur sebagai berikut:

- a. Bangunan sangat rendah yaitu bangunan bertingkat dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar maksimum 12 (dua belas) meter dan ALL maksimum= 2 x ALD.
- b. Bangunan Rendah yaitu bangunan bertingkat dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar minimum 12 (dua belas) meter, maksimum 24 (dua puluh empat) meter serta ALL minimum 3 x ALD, dan ALL maksimum = 4 x ALD.

- c. Bangunan Sedang yaitu bangunan bertingkat dengan tinggi puncak bangunan dari lantai dasar minimum 24 (dua puluh empat) meter, maksimum 40 (empat puluh) meter serta ALL minimum $5 \times \text{ALD}$, dan ALL maksimum = $8 \times \text{ALD}$.
- d. Bangunan Tinggi yaitu bangunan bertingkat dasar tinggi puncak bangunan dari lantai dasar minimum 40 (empat puluh) meter dan ALL minimum = $9 \times \text{ALD}$.
- e. Bangunan Dalam (basement) yaitu bangunan bertingkat dibawah tanah dengan kedalaman maksimum 6 (enam) meter dan ALL $2 \times \text{ALD}$.

Pasal 6

Perbandingan luas Lantai Dasar dan petak peruntukan ditentukan sebagai berikut

- a. Untuk Angka Lantai Dasar (ALD) Tinggi (lebih besar 75%) diperuntukan bagi bangunan rendah (maksimum 4 lantai) dengan penggunaan pertokoan, bangunan komersil merapat jalan dii kawasan perdagangan.
- b. Untuk Angka Lantai Dasar (ALD) sedang (50%-70%) diperuntukan bagi bangunan rendah (maksimum 8 lantai) untuk bangunan perkantoran komersil atau bangunan perumahan dengan statistik blok.
- c. Untuk Angka Lantai Dasar (ALD) rendah (20%-50%) bagi bangunan tinggi (minimum 9 lantai) untuk bangunan perkantoran dan komersil atau bangunan sangat rendah dengan penggunaan industri.
- d. Jika dalam suatu bangunan bertingkat terdapat bangunan dibawah permukaan tanah , maka ALD nya dihitung berdasarkan angka terbesar dari ALD dan angka luas lantai dibawah permukaan tanah.

Pasal 7

Luas persil Bangunan bertingkat diatur sebagai berikut

- a. Persil Besar yaitu persil dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) merupakan luas minimal bagi bangunan tinggi.
- b. Persil Sedang yaitu persil dengan luas antara 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) merupakan luas minimal bagi bangunan Bertingkat Sedang.
- c. Persil Kecil yaitu persil dengan luas antara 1.000 m² (seribu mater persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) merupakan luas minimal bagi Bangunan Bertingkat Rendah.
- d. Persil Sangat Kecil yaitu persil dengan luas sampai dengan luas sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) merupakan luas maksimal bagi Bangunan Bertingkat Sangat Rendah.

Pasal 8

Garis Sempadan Depan Bangunan (GSDB), Garis Sempadan Belakang Bangunan Bertingkat akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemilik Bangunan harus menyediakan ruang terbuka yang dapat menyerap air sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari bagian persil yang tidak tertutup bangunan.

BAB IV BANGUNAN KONVERSI

Pasal 10

Bangunan-bangunan yang oleh Pemerintah ditentukan sebagai bangunan yang dikonservasi, tidak dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini mengakibatkan.

- a. Ditolaknya permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Diberikan peringatan untuk menghentikan pekerjaan bangunan bagi yang terlanjur pembangunan dimulai.
- c. Diberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali.
Perpanjangan IMBS dikenakan Restribusi sebesar 17,5 % dari nilai bangunan yang berlaku pada saat perpanjangan.
- d. Pembongkaran bangunan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah dan Kepala Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Selain oleh Penyidik Umum/POLRI, penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi bangunan Bertingkat yang telah selesai dibangun dan telah dimiliki Ijin Mendirikan Bangunan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini dianggap sudah memenuhi peraturan Daerah ini kecuali akan menambah tingkatnya/jumlah lantainya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah tentang Bangunan Bertingkat ini merupakan kelengkapan dan tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 16 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,
Cap ttd.

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA,

ttd

HARTOMO

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 16 tanggal 19 September Tahun 1991
Seri B No. 3

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 11 September 1991
No. 188.3/335/1991

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

a.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd.

Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. SAMSUDIAT

S A R D J I T O, S H.

Pembina

NIP. 010 036 947

NIP. 500 034 373

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

ttd

SOETARNO, S H. C H

Penata Tk. I

NIP. 500 035 840

LAMPIRAN : Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
 Nomor 6 tahun 1991 Tentang Bangunan Bertingkat Di
 Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

TABEL KETINGGIAN BANGUNAN UNTUK PERDAGANGAN, PEMUKIMAN DAN PERKANTORAN

SWP	NAMA JALAN	TATA GUNA TANAH POTENSIAL	LUAS PERSIL (m2)	TINGGI BANGUNAN LANATAI (m)	A L D (%)	A L L (%)	SRP (%)	A R H (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Suryo	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 - 20
	Cokroaminoto	II	1000 – 2000	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 – 130	20 – 30	5 – 20
			2500 – 5000	5 – 9 (24-40)	50 – 75	250 – 600	20 – 30	5 - 20
	Kyai Mojo	II	1000 – 2000	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 – 130	20 – 30	5 – 20
			2500 – 5000	5 – 9 (24-40)	50 – 75	250 – 600	20 – 30	5 - 20
II	Sugiyopranoto	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 – 20
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 - 300	20 – 30	5 – 20
	Yosodipuro	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 – 20
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 - 300	20 – 30	5 – 20
	R. M Said	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 – 20
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 - 300	20 – 30	5 – 20
	Ahmad Dahlan	I	- 1000	2 (12)	75 – 80	100 - 160	15 - 20	5
	J u a n d a	I	- 1000	2 (12)	75 – 80	100 – 150	15 – 20	5
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	75 – 80	225 - 320	15 – 20	5
	Teuku Umar	I	- 1000	2 (12)	50 – 75	150 - 160	15 - 20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Imam Bonjol	I	- 1000	2 (12)	75 – 80	105 – 160	15 - 20	5
	Ronggowarsito	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	W. Monginsidi	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 –	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Kartini	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 - 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Hasanudin	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 - 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Diponegoro	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 – 320	15 – 20 15 – 20	5 5
	Kapten Mulyadi	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 – 320	15 – 20 15 – 20	5 5
	Jenderal A. Yani	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 - 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Gajah Mada	II	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	50 – 75 50 – 75	150 - 300 250 - 600	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Sutan Syahrir	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 - 320	15 – 20 15 – 20	5 5
	Letjen S. Parman	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 - 320	15 – 20 15 – 20	5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urip Sukoharjo	I	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	75 – 80 75 – 80	375 – 640 675 -	15 – 20 15 – 20	5 5
	Jenderal Sudirman	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 –	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 - 20
	Slamet Riyadi	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 –	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
III	Kapten Mulyadi	I	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	75 – 80 75 – 80	375 – 640 675 -	15 – 20 15 – 20	5 5
	Brigjen Sudirman	I	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	75 – 80 75 – 80	375 – 640 675 -	15 – 20 15 – 20	5 5
	V e t e r a n	I	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	75 – 80 75 – 80	375 – 640 675 -	15 – 20 15 – 20	5 5
	Honggowongso	I	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	75 – 80 75 – 80	225 – 320 375 – 640	15 – 20 15 – 20	5 5
	Yos Sudarso	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 – 400	15 – 20 15 – 20	5 5
	Jend Gatot Subroto	I	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	75 – 80 75 – 80	150 – 160 225 – 400	15 – 20 15 – 20	5 5
	Slamet Riyadi	I	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	75 – 80 75 – 80	375 – 640 675 -	15 – 20 15 – 20	5 5
	Dr Rajiman	I	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	75 – 80 75 – 80	225 – 400 375 – 640	15 – 20 15 – 20	5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Dr Cipto	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 - 150	20 – 30	5 – 20
	Perintis Kemerdekaan	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Bhayangkara	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Hasanuddin	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 - 20
	Dr. Wahidin	II	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	50 – 75 50 – 75	150 – 300 250 –600	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	MT Haryono	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Adi Sucipto	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Dr Rajiman	II	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	50 – 75 50 – 75	150 – 300 250 –600	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Dr Muwardi	II	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	50 – 75 50 – 75	150 – 300 250 –600	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	V e t e r a n	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Slamet Riyadi	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	Agus Salim	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 - 20
	Dr. Rajiman	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Slamet Riyadi	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 - 20
VI	Prof. Dr. Suharso	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Adi Sucipto	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Jenderal A. Yani	II	2500 – 5000 5000 – 10000	5 – 9 (24-40) 9 – 20 (40-)	50 – 75 50 – 75	250 – 600 450 -	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
VII	Letjen Suprpto	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Adi Sumarmo	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	Ki Mangun Sarkoro	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
VIII	S u t o y o	II	- 1000 1000 – 2500	2 (12) 2 – 5 (12-24)	50 – 75 50 – 75	100 – 150 150 – 300	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20
	S u g i y o n o	II	1000 - 2500 2500 – 5000	2 – 5 (13 -24) 5 – 9 (24-40)	50 – 75 50 – 75	150 – 300 250 –600	20 – 30 20 – 30	5 – 20 5 – 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	Brigjen Katamso	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 – 20
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 – 300	20 – 30	5 – 20
	Ki Hajar Dewantoro	II	- 1000	2 (12)	50 – 75	100 – 150	20 – 30	5 – 20
			1000 – 2500	2 – 5 (12-24)	50 – 75	150 – 300	20 – 30	5 – 20
	Ir Sutami	II	2500 – 5000	5 – 9 (24-40)	50 – 75	250 – 600	20 – 30	5 – 20
			5000 – 10000	9 – 20 (40-)	50 – 75	450 -	20 – 30	5 – 20
	Kolonel Sutarto	II	2500 – 5000	5 – 9 (24-40)	75 – 80	375 – 640	15 – 30	5
			5000 – 10000	9 – 20 (40-)	75 – 80	675 -	15 – 30	5

s

Keterangan : I = Perdagangan

II = Pemukiman / Perkantoran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A
KETUA
ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTOMO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1991

TENTANG
BANGUNAN PEMERINTAH DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Surakarta sebagai Kota terpenting dan terbesar kedua di Jawa Tengah, mempunyai kesempatan berkembang sebagai Kota perdagangan, industri, wisata, budaya, pendidikan dan olah raga serta pelayanan administrasi pemerintahan. Selain hal tersebut diatas Surakarta juga sebagai pusat Wilayah Pembangunan IV di Jawa Tengah peran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sangat besar dalam aktifitas jasa perdagangan yang melayani wilayah: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten, peran ini bahkan menjangkau melewati batas Propinsi Jawa Tengah, antara lain Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Ponorogo.

Untuk mendukung hal tersebut telah dibangun dan dikembangkan prasarana perkotaan untuk menunjang perkembangan berbagai fungsi kota tersebut. Akibatnya disamping terjadi persaingan penampilan fisik tersebut belum menampilkan keharmonisan visual yang memberikan nilai tambah bagi faktor kenikmatan Kota, karena adanya berbagai benturan tatapan bangunan antara yang klasik peninggalan budaya masa lalu dan modern, besar dan bertingkat yang berorientasi pada efisiensi dan ekonomi.

Perlu disepakati bersama bahwa untuk mendukung Program Trikrida Utama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yaitu sebagai Kota Budaya, Olah Raga dan Pariwisata maka perlu adanya tatanan bangunan klasik dan tradisional yang merupakan salah satu obyek kebudayaan yang mempunyai nilai ganda yaitu untuk melindungi bangunan-bangunan yang oleh Pemerintah sebagai bangunan yang dekonservasi seperti Kraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran dipandang perlu tidak dikenakan ketentuan berlaku bagi bangunan bertingkat. Untuk mengatur ketinggian bangunan di dua kawasan

keraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran tersebut diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan tujuan bangunan bernilai sejarah dapat diserasikan dengan bangunan baru, yang diharapkan merupakan modifikasi dan konsep yang bernilai sejarah dengan kemajuan jaman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Garis Sempadan Depan Bangunan (GSDB)
Garis Sempadan Belakang Bangunan (GSBB) dan Garis Sempadan Samping Bangunan (GSSB) bagi bangunan bertingkat, tidak diberlakukan ketentuan yang diatur dalam pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988.

Pasal 9 s/d 16 : Cukup Jelas.